

TESIS

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

***REGIONAL FINANCIAL CAPABILITIES AND ECONOMIC
GROWTH IN TORAJA UTARA DISTRICT***

**RIBKA PABUTUNGAN
A042191003**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN TORAJA UTARA

REGIONAL FINANCIAL CAPABILITIES AND ECONOMIC GROWTH IN TORAJA UTARA DISTRICT

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**RIBKA PABUTUNGAN
A042191003**



Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN
EKONOMI DI KABUPATEN TORAJA UTARA**

disusun dan diajukan oleh

**RIBKA PABUTUNGAN
A042191003**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 30 Agustus 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si
NIP. 196904131994031003

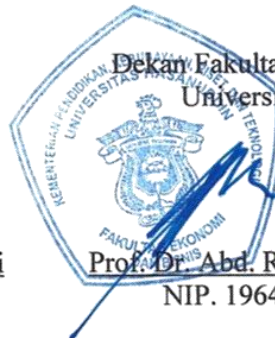


Dr. Djumidah Maming, S.E., M.Si
NIP. 196604011991032001

Ketua Program Studi
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si
NIP. 197106192000031001



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIBKA PABUNTUNGAN

NIM : A042191003

Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN TORAJA UTARA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan Daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 55 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 2021
Yang membuat pernyataan,


RIBKA PABUTUNGAN
A042191003

PRAKATA

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
3. Dr. Sanusi Fattah, S.E.,M.Si dan Dr. Djumidah Maming, S.E.,M.Si Pembimbing Utama dan Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga selama penulis menyusun tesis ini.
4. Dr. Kalatiku Paembonan, SE., M.Si, (Bupati Toraja Utara 2016-2021) dan Yohanis Bassang SE, M.Si (Bupati Toraja Utara sekarang) yang telah memberikan ijin dan dukungan moril dan materil kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang Magister pada Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin
5. Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si.,CRA.,CRP.,CWM Ketua Program Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah meluangkan waktu, kesempatan dan senantiasa mendukung kesuksesan dan penyelesaian tesis ini.

6. Dr. Sri Sundari, SE., Ak., M.Si., CA, Dr. Mursalim Nohong, SE., M.Si, Dr. Hamrullah, SE., M.Si, sebagai Tim penilai yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.
7. Terkhusus kepada keluarga penulis yang selama mengikuti pendidikan tersita waktu dan perhatiannya, dan teman - teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan dalam penyusunan dan penyelesaian tesis ini.

Penulis

RIBKA PABUTUNGAN

ABSTRAK

RIBKA PABUTUNGAN. *Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Toraja Utara* (dibimbing oleh Sanusi Fattah dan Jumidah Maming).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kemandirian, ketergantungan keuangan daerah, efektivitas pendapatan, dan derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara, ketergantungan keuangan daerah, efektivitas pendapatan, dan desentralisasi fiskal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara. Akan tetapi, kemandirian, ketergantungan keuangan daerah, efektivitas pendapatan, dan desentralisasi fiskal bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toraja Utara.

Kata kunci: Kemandirian, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi



ABSTRACT

RIBKA PABUTUNGAN. *Regional Financial Capability and Economic Growth in North Toraja Regency* (supervised by **Sanusi Fattah** and **Jumidah Maming**)

The aim of this study is to determine the effect of independence, regional financial dependence, income effectiveness, and the degree of fiscal decentralization on economic growth in North Toraja Regency.

The method used in this study was quantitative descriptive method.

The results show that independence has a significant effect on economic growth in North Toraja District. Meanwhile, regional financial dependence, income effectiveness, and fiscal decentralization have no effect on economic growth in North Toraja Regency. However, independence, regional financial dependence, revenue effectiveness, and fiscal decentralization simultaneously have a positive and significant effect on the economic growth of North Toraja Regency.

Keywords: regional finance independence, regional finance dependence, income effectiveness, economic growth



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	117
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian	10
1.4.1. Kegunaan Teoritik	10
1.4.2. Kegunaan Praktik.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teoritis.....	11
2.1.1 Teori Perencanaan Pengembangan Daerah.....	16
2.1.2 Keuangan Daerah.....	13
2.1.2.1 Pengertian Keuangan Daerah	13
2.1.2.2 Tujuan Keuangan Daerah	16
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	17
2.1.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	17
2.1.3.2 Komponen Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah	

(APBD).....	19
2.1.3.3 Pihak yang Terlibat dalam Anggaran Pemerintah Daerah.....	20
2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	22
2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	22
2.1.4.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	23
2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi	28
2.1.5.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi	28
2.1.5.2 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	29
2.1.5.3 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi	34
2.1.5.4 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi.....	36
2.1.6 Kemampuan Keuangan Daerah	36
2.1.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	38
2.1.6.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.....	38
2.1.6.3 Rasio Efektivitas Pendapatan	39
2.1.6.4 Derajat Desentralisasi Fiskal	39
2.2 Tinjauan Empiris	40
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	50
3.1 Kerangka Konseptual.....	50
3.1.1 Hubungan Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	50
3.1.2 Hubungan Kemampuan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	53
3.1.3 Hubungan Efektivitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	54
3.1.4 Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	54
3.1.5 Hubungan Kemandirian, Kemampuan Keuangan, Efektivitas dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	55
3.2 Hipotesis	57
BAB IV METODE PENELITIAN	58
4.1 Rancangan Penelitian.....	58
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	58
4.3 Jenis dan Sumber Data	58
4.3.1 Jenis Data.....	58
4.3.2 Sumber Data	59
4.4 Metode Pengumpulan Data	59

4.4.1	Penelitian Pustaka (<i>Library Research</i>)	59
4.4.2	Penelitian Lapangan (<i>Field Research</i>).....	59
4.5.	Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	60
4.5.1.	Variabel Dependent	60
4.5.2.	Variabel Independent.....	60
4.6.	Teknik Analisis Data	62
4.6.1.	Uji Instrumen Penelitian	62
4.6.2.	Analisis Regresi	64
4.7.	Uji Hipotesis	67
 BAB V HASIL PENELITIAN.....		70
5.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	70
5.2	Analisis Deskriptif	71
5.2.1	Kemandirian.....	71
5.2.2	Ketergantungan Keuangan.....	76
5.2.3	Efektivitas Pendapatan.....	81
5.2.4	Desentralisasi Fiskal	85
5.2.5	Pertumbuhan Ekonomi	90
5.3	Uji Instrumen Penelitian	91
5.3.1	Uji Normalitas.....	91
5.3.2	Uji Multikoleaniritas.....	92
5.3.3	Uji Heteroskedastisitas	93
5.3.4	Uji Autokorelasi.....	94
5.4	Uji Regresi	95
5.4.1	Regresi Linear Berganda	95
5.4.2	Koefisien Korelasi	97
5.4.3	Koefisien Determinasi	98
5.5	Uji Hipotesis	99
5.5.1	Uji Parsial (Uji T)	99
5.5.2	Uji Simultan (Uji F)	101

BAB VI HASIL PENELITIAN.....	102
6.1 Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	103
6.2 Pengaruh Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	104
6.3 Pengaruh Efektivitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	106
6.4 Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.....	107
6.5 Pengaruh Kemandirian Keuangan, Ketergantungan Keuangan Daerah, Efektivitas dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	107
BAB VII PENUTUP.....	110
7.1 Kesimpulan.....	110
7.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	113

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.2. PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 - 2019.....	5
Tabel 1.2. Realisasi dan Pertumbuhan PAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014-2019.....	7
Tabel 2.1. Matriks Penelitian Sebelumnya.....	47
Tabel 4.1. Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi	64
Tabel 4.2 Interpretasi Koefisien Korelasi	
Tabel 5.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sampai 2020.....	72
Tabel 5.2. Presentase Pertumbuhan Kemandirian Keuangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sampai 2020.....	75
Tabel 5.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Penerimaan APBD Tanpa Subsidi Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sampai 2020.....	76
Tabel 5.4. Presentase Pertumbuhan Kemampuan Keuangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sampai 2020	79
Tabel 5.5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sampai 2020.....	81
Tabel 5.6. Presentase Pertumbuhan Efektivitas Keuangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sampai 2020.....	84
Tabel 5.7. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sampai 2020.....	85
Tabel 5.8. Presentase Pertumbuhan desentraliasi fiskal Keuangan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sampai 2020.....	89
Tabel 5.9. Presentase Pertumbuhan PDRB Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 sampai 2020.....	90

Tabel 5.10. <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	92
Tabel 5.11. <i>Collinearity Statistics</i>	93
Tabel 5.12. Durbin Watson	94
Tabel 5.13 <i>Coefficients</i>	96
Tabel 5.14 Model <i>Summary</i>	98
Tabel 5.15 Pengujian Partial (Uji T)	99
Tabel 5.16 <i>Anova</i>	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual	57
Gambar 5.1 Scatterplot Dependent Variable Pertumbuhan Ekonomi	94

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia tidak mengenal adanya sistem sentralistik sebagaimana yang tersirat dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang asas penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sehingga terdapat pemerintah daerah dan daerah otonom atau wilayah yang bersifat administratif. Hal ini ditujukan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual.

Diterapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, akan dapat memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah secara demokratis, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, terutama kepada pemerintah kabupaten dan pemerintah kota.

Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah guna peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan sosial, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Menurut Gousario & Dharmastuti (2015)

menyatakan bahwa otonomi daerah tidak hanya untuk menghilangkan disintegrasi bangsa, tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan manajemen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Otonomi daerah di Indonesia juga dipandang sebagai strategi untuk menjawab tuntutan masyarakat lokal terhadap tiga isu utama pembangunan yaitu pembagian kekuasaan, distribusi pendapatan, dan kemandirian sistem manajemen. Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah semakin besar, sehingga tanggung jawab yang diemban juga bertambah banyak. Darumurti dan Rauta (2000) mengemukakan implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintah yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah. Namun dari sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk pelaksanaannya karena semakin bertambah urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang harus dipersiapkan, antara lain sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan prasarana daerah.

Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk dapat mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah sampai sejauh dan seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri guna membiayai kebutuhan daerah tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Selain itu, salah satu kriteria penting untuk

mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keuangan merupakan faktor penting dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam melakukan tugas otonomi daerah, dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah dari segi keuangan adalah instrument utama bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran pendapatan serta pengeluaran sehingga dapat digunakan sebagai pengambil keputusan untuk perencanaan pembangunan (Woestho dkk, 2020). Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah, PAD selalu dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD, maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah dari prinsip secara nyata dan bertanggung jawab.

Mengetahui apakah daerah dapat melaksanakan pembangunan dengan responsive, akuntabel, transparan serta efisien tercermin dari kinerja daerah mengelola APBD-nya. Menurut Royda & Riana (2019) pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan

menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Menurut Halim dalam Wahab dkk (2014) bahwa untuk menganalisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kemampuan keuangan daerah. Rumus yang digunakan dalam mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Kota atau Provinsi yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas dan rasio efisien PAD.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu tolok ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan adanya pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Adapun salah satu faktor juga dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah dengan melihat pertumbuhannya. Dalam menyusun pembangunan daerah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi target utama. Menurut Restiatun dalam Pratama dan Soejoto (2013) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diperlukan guna mempercepat struktur

perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat dan maju, serta memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi menjadi gambaran kinerja dalam melakukan pembangunan. Pernyataan tersebut juga menyimpulkan bahwa PDRB yang meningkat maka akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Rantepao. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mutlak/wajib diselenggarakan oleh birokrasi penyelenggara pemerintahan yang akan mendorong terciptanya *trust* sekaligus membangun citra positif pemerintah. Tidak terkecuali informasi keuangan seperti Ringkasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (RKA-SKPD), Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan lain-lain, pemerintah berkewajiban memberikan/mengumumkan informasi keuangan tersebut secara terbuka kepada publik luas.

Untuk melihat PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Toraja Utara tahun 2014-2019 disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 PDRB dan PDRB Perkapita Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 - 2019

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai PDRB (Miliar Rp)						
- ADHB	5.031,50	5.886,77	6.788,21	7.720,94	8.696,50	9.596,35

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai PDRB (Miliar Rp)						
- ADHK 2010	3.510,36	3.782,80	4.085,69	4.421,68	4.778,53	5.140,01
PDRB perkapita (Juta Rp)						
- ADHB	22.46	26.10	29,91	33.80	37.84	41,50
- ADHK 2010	15.671,05	16.773,96	19.358,18	19.358,18	20.802,76	21.346,16
Pertumbuhan Ekonomi	7,64	7.76	8,01	8,22	8,07	7,56
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	6,87	7.04	7,31	7,55	7,46	7,62
Jumlah Penduduk (000 org)	224.003	225.516	226.988	228.414	229.798	230.245
Pertumbuhan	0,72	0,68	0,65	0,63	0,61	0,60

Sumber : BPS Kabupaten Toraja Utara, diolah tahun 2021

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2014-2019 yang terus meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Toraja Utara rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Jumlah penduduk meningkat rata-rata kisaran 0,6-0,7 persen setiap tahunnya, sementara pertumbuhan PDRB perkapita secara riil meningkat dikisaran 6-7 persen. Dari tahun 2014 sampai 2019 tercatat angka pertumbuhan PDRB perkapita penduduk Kabupaten Toraja Utara terus mengalami peningkatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk Toraja Utara selalu diikuti dengan kualitas perekonomian, meskipun peningkatan ekonomi tersebut belum dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat.

Pada tabel 1.1 memperlihatkan peningkatan PDRB setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2019. Tetapi peningkatan PDRB pada Kabupaten Toraja Utara tidak diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Toraja Utara terjadi pada tahun 2018 menurun sebesar 0,15% dan tahun 2019 menurun sebesar 0,51%. Sedangkan PDRB pada tahun 2018 meningkat sebesar 11,2% dan pada tahun 2019 meningkat sebesar 9,3%.

Sebagai salah daerah otonom, Kabupaten Toraja Utara terus berbenah diri untuk meningkatkan sumber-sumber penerimaan untuk menciptakan kemandirian daerah. Sekalipun kondisi fiskal di Kabupaten Toraja Utara dari empat komponen sumber penerimaan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah belum berperan optimal.

Realisasi dan pertumbuhan PAD Kabupaten Toraja Utara tahun 2014 - 2019 akan diperlihatkan pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2 Realisasi dan Pertumbuhan PAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014-2019

Tahun	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2014	25.284.958.933,94	27,54
2015	33.808.406.734,57	33,71
2016	34.896.616.654,95	3,22
2017	44.165.976.208,92	26,56
2018	41.975.878.750,80	-4,96
2019	51.867.651.798,99	23,57

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Toraja Utara tahun 2021

Berdasarkan Tabel 1.2, pertumbuhan PAD Kabupaten Toraja Utara cenderung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014, pertumbuhan PAD mencapai 27,54 % meningkat menjadi 33,71 % pada tahun 2015. Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah, lalu menurun signifikan menjadi 3,22 % pada tahun 2016. Pada tahun 2017, meningkat kembali menjadi 26,56 %, kemudian menurun sebesar 4,96 % pada tahun 2018, lalu kembali meningkat sebesar 23,57 % pada tahun 2019.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Toraja Utara terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, sehingga mampu berdampak pada perekonomian daerah. Kemampuan keuangan daerah diukur dengan beberapa indikator antara lain, rasio kemandirian, kemampuan keuangan, efektivitas pendapatan, dan derajat desentralisasi (Sumardjoko, 2019). Namun yang menjadi permasalahan adalah belum adanya bukti empiris yang menunjukkan pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara karena itu penting untuk diteliti. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menganalisis pengaruh kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah kemandirian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di

Kabupaten Toraja Utara?

2. Apakah ketergantungan keuangan daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara?
3. Apakah efektivitas pendapatan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara?
4. Apakah derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara?
5. Apakah kemandirian, ketergantungan keuangan, efektivitas pendapatan dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh ketergantungan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas pendapatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara.
5. Untuk mengetahui pengaruh kemandirian, kemampuan keuangan,

efektivitas pendapatan dan derajat desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai keuangan daerah terkait kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Menemukan solusi atas masalah yang ditemukan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh berbagai pihak untuk:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan bukti empiris mengenai keterkaitan kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara.
2. Penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah daerah untuk menilai kinerja keuangan daerah selama ini terhadap perekonomian.
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Manajemen Keuangan Daerah (MKD).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Teori Perencanaan Pengembangan Daerah

Konsep pengembangan daerah dapat dikonstruksikan dengan mengimplementasikan teori saling ketergantungan atau *dependency* pertumbuhan ekonomi *neo* klasik dan *neo keynes*. Teori tersebut berguna untuk menjelaskan proses perkembangan ekonomi daerah dan memberi basis bagi perencanaan pembangunan daerah.

Pendapat Hirschman dalam Adisasmita (2013) menyatakan setiap wilayah memiliki perbedaan potensi faktor pertumbuhan yang meliputi sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi. Perbedaan faktor pertumbuhan ekonomi ini mendorong spesialisasi daerah berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing daerah. Setiap daerah akan berkonsentrasi untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memanfaatkan secara intensif faktor produksi yang relatif berlebih atau *resources endowment*. Spesialisasi memberikan keunggulan komparatif dalam produksi. Karakteristik ini akan mendorong perdagangan antar daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun dalam jangka panjang, mungkin dapat terjadi kesetaraan harga relatif faktor produksi antar wilayah atau *production factor's equalization* (Ohlin dalam Adisasmita, 2013). Kondisi ini menggambarkan terjadinya proses konvergensi pertumbuhan antar daerah.

Paradigma ini memandang ekonomi daerah terdiri dari sektor basis dan non basis. Sektor basis berfungsi untuk melayani permintaan dari luar atau

menghasilkan barang dan jasa untuk ekspor, sedangkan sektor non basis berfungsi melayani kebutuhan setempat atau menunjang sektor basis. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk melayani permintaan eksternal melalui pengembangan sektor basis. Pertumbuhan ekonomi tersebut dihasilkan melalui proses efek pengganda atau *multiplier effects*. Pengembangan daerah memerlukan dukungan manajemen keuangan yang modern untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan keuangan daerah menganut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *value for money* yang memuat ekonomis, efisiensi dan efektif. Transparansi merupakan wujud adanya keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran daerah. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan bersama, terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat (Alis & Jamaluddin, 2018).

Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban publik mempunyai makna sebagai proses penganggaran, mulai dari perencanaan, penyusunan, sampai dengan tahap pelaksanaan harus dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada DPRD sebagai wakil masyarakat. Publik tidak hanya sebatas mempunyai hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana dan pelaksanaan anggaran tersebut. Aspek penting yang mendasari pengelolaan anggaran berbasis kinerja adalah *value for money* dan *good corporate governance* (Taufiqurrahman, 2014). Prinsip *value for money* mengedepankan prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektifitas dalam proses penganggaran. Ekonomi berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan

sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang paling murah. Efisiensi berarti penggunaan dana masyarakat atau *public money* harus menghasilkan *output* yang maksimal atau berdaya guna. Efektifitas mengindikasikan penggunaan anggaran harus mencapai target atau tujuan yang menyangkut kepentingan publik (Wibisono, 2005). *Element value for money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* sebagai bentuk keluaran saja, akan tetapi harus mempertimbangkan *input*, *output*, dan *outcome* secara bersama-sama.

Beberapa aspek perlu diperhitungkan dalam pengukuran distribusi dan cakupan layanan atau *equity and service coverage*. Persoalan yang kerap dihadapi pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulit untuk melakukan pengukuran *output* (Feriska, 2015). Hasil keluaran yang dihasilkan tidak selalu berupa *output* yang berwujud tetapi dapat juga berupa intangible output yang jumlahnya banyak. Publik menginginkan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran publik terkait pelaksanaan *value for money* antara lain dalam bentuk ekonomis terkait pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi terkait penggunaan sumber daya. Biaya perolehan pada taraf minimal dan keluaran yang dihasilkan maksimal atau *maximizing benefits and minimizing costs*, serta efektif terkait pencapaian tujuan dan sasaran.

2.1.2. Keuangan Daerah

2.1.2.1. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala

sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sedangkan keuangan negara ialah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kekayaan daerah ini sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Pasal 1 ayat 5 PP No. 58 Tahun 2005 dalam Halim, 2007). Keuangan Daerah dapat juga diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga dengan segala satuan, baik yang berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum di miliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesa dalam Halim, 2007).

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa dalam keuangan daerah terdapat dua unsur penting yaitu :

1. Semua hak dimaksudkan sebagai hak untuk memungut pajak daerah, retribusi daerah dan/atau penerimaan dan sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku merupakan penerimaan daerah sehingga menambah kekayaan daerah;

2. Kewajiban daerah dapat berupa kewajiban untuk membayar atau sehubungan adanya tagihan kepada daerah dalam rangka pembiayaan rumah tangga daerah serta pelaksanaan tugas umum dan tugas pembangunan oleh daerah yang bersangkutan.

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menciptakan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab.

Pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab memerlukan dana yang cukup dan terus meningkat sesuai dengan meningkatnya tuntutan masyarakat, kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Dana tersebut diperoleh melalui kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan. Oleh karena itu, keuangan daerah merupakan tolak ukur bagi penentuan kapasitas dalam menyelenggarakan tugas-tugas otonomi, disamping tolak ukur lain seperti kemampuan sumber daya alam, kondisi demografi, potensi daerah, serta partisipasi masyarakat.

2.1.2.2 Tujuan Keuangan Daerah

Tujuan utama pengelolaan keuangan daerah, yaitu (1) Tanggung jawab, (2) Memenuhi kewajiban keuangan, (3) Kejujuran, (4) Hasil guna, dan (5) Pengendalian (Binder dalam Adisasmita, 2013). Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah saat ini, maka perspektif perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah adalah sebagai berikut (Mardiasmo, 2000):

1. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (*public oriented*). Hal ini tidak hanya terlihat dari besarnya pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat dari besarnya partisipasi masyarakat (DPRD) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan daerah.
2. Kejelasan tentang misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran daerah pada khususnya.
3. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran serta dari partisipasi yang terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, Kepala Daerah, Sekretaris Daerah dan perangkat daerah lainnya.
4. Kerangka hukum dan administrasi atas pembiayaan, investasi dan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, transparansi dan akuntabilitas.
5. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, Kepala Daerah, dan PNS, baik rasio maupun dasar pertimbangannya.
6. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan

anggaran multi tahunan.

7. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang-barang daerah yang lebih profesional.
8. Prinsip akuntansi pemerintah daerah, laporan keuangan, peran DPRD, peran akuntan publik dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
9. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi dan peran anggota masyarakat guna pengembangan profesionalisme aparat pemerintah daerah.
10. Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat dan komitmen pemerintah daerah terhadap penyebaran informasi, sehingga memudahkan pelaporan dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

2.1.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Guna menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material, dan sumber daya lainnya secara sistematis dan akuntabel, diperlukan suatu rencana keuangan yang andal dan terwujud dalam suatu penganggaran. Selain sebagai alat ukur dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah, sistem penganggaran yang dikembangkan oleh pemerintah berfungsi sebagai pengendali keuangan, rencana manajemen, prioritas penggunaan dana, dan pertanggungjawaban kepada publik. Terkait dengan rencana manajemen, sistem penganggaran berfungsi sebagai suatu metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang

dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan dimana manfaat tersebut dideskripsikan melalui seperangkat sasaran dan dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja. Untuk mengidentifikasi keterkaitan biaya dengan manfaat serta keterkaitan antara nilai uang dan hasil di tingkat pemerintahan daerah, pemerintah daerah menuangkan penganggaran tersebut dalam suatu rencana keuangan yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan peraturan daerah”. Kebijakan fiskal biasanya diartikan sebagai tindakan pemerintah dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tingkat nasional, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkat daerah. Anggaran tersebut menggambarkan rincian kegiatan operasional pemerintahan dan pembangunan yang dinyatakan dalam rupiah untuk suatu periode tertentu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif yaitu DPRD (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017). Untuk melihat kemampuan daerah dalam melakukan tugas otonomi daerah, dapat dilihat dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan rencana tahunan pemerintah daerah dari segi keuangan adalah instrument utama bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran pendapatan serta pengeluaran sehingga dapat digunakan sebagai pengambil keputusan untuk perencanaan pembangunan.

2.1.3.2 Komponen Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain- Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Komponen belanja daerah merupakan perwujudan pemerintah daerah dalam mengeluarkan uangnya untuk pelayanan publik. Terdapat empat pos utama di dalam belanja daerah yaitu pos Belanja Pegawai, pos Belanja Barang dan Jasa, pos Belanja Modal, dan pos Belanja lainnya. Melalui belanja daerah ini diperoleh informasi prioritas belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang dapat

berdampak pada kesejahteraan warganya (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017).

2.1.3.3 Pihak yang Terlibat dalam Anggaran Pemerintah Daerah

Adapun menurut Wiratna Sujarweni (2015:60) “pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Pihak Eksekutif

Pihak-pihak yang terlibat dalam pihak eksekutif yaitu terdiri dari:

a. Bupati/Walikota

Sebagai pengambil keputusan utama dalam menentukan kegiatan dan pelayanan publik.

b. Sekretaris Daerah (Sekda)

Sebagai koordinator Tim Anggaran Eksekutif yang mempunyai tugas antara lain menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) kepada DPRD. Kebijakan umum anggaran adalah dokumen yang akan dijadikan landasan utama dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

c. Tim Anggaran Eksekutif

Ketuanya adalah Sekretaris Daerah yang bertugas untuk menyusun kebijakan umum anggaran dan mengkompilasikan rencana kerja Anggaran setiap satuan kerja (RKA-SKPD) menjadi RAPBD.

d. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

SKPS adalah unit kerja pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan mempunyai tugas untuk

menyusun dan melaksanakan anggaran pada unit kerja yang bersangkutan.

e. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPEDA)

BAPEDA merupakan unit perencanaan daerah yang mempunyai tugas antara lain untuk menyiapkan berbagai dokumen perencanaan dan pembangunan di daerah.

f. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

Bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah (APBD) dan berfungsi sebagai bendahara umum daerah. BPKD bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2. Pihak Legislatif

Pihak Legislatif yang terlibat dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah antara lain adalah:

a. Panitia Anggaran Legislatif

Suatu tim khusus yang bertugas untuk memberikan saran dan masukan kepada kepala daerah (bupati/walikota) tentang penetapan, perubahan, dan perhitungan APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

b. Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Alat kelengkapan DPRD yang dibentuk untuk memperlancar tugas-tugas DPRD dalam bidang pemerintah, perekonomian dan pembangunan, keuangan, investasi daerah, serta kesejahteraan rakyat.

2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.4.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain (Kaho, 1998). PAD dapat memberikan warna tersendiri terhadap tingkat ekonomi suatu daerah, karena jenis pendapatan ini dapat digunakan secara bebas oleh daerah. PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Halim dan Kusufi (2014 : 101) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan Badrudin (2012:100) menyatakan “Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dalam rangka menganalisis kemampuan keuangan daerah, perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber-sumber penghasilan dan pembiayaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004.

2.1.4.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
 - a. Hasil pajak dan retribusi daerah
 - b. Hasil perusahaan milik daerah
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
2. Dana perimbangan.
3. Pinjaman daerah
4. Pendapatan daerah lain-lain yang sah.

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 dan ayat 64 menyebutkan bahwa Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:101) “Pendapatan Asli Daerah dapat dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu sebagai berikut :

1. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak. Jenis pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu jenis pajak untuk Provinsi dan jenis pajak untuk Kabupaten/Kota.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Menurut jenis retribusi daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah Kabupaten/kota yaitu sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis pendapatan retribusi jasa umum ini adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi pelayanan kesehatan
- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- 3) Retribusi penggantian beban cetak KTP dan beban cetak akta catatan sipil.
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- 5) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum

- 6) Retribusi pelayanan pasar
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadaman kebakaran
- 9) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- 10) Retribusi pengelolaan limbah cair
- 11) Retribusi penggantian beban cetak peta
- 12) Retribusi pelayanan pendidikan
- 13) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi jasa usaha pemerintah kabupaten/kota meliputi berikut ini:

- 1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- 2) Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan
- 3) Retribusi jasa usaha tempat pelelangan
- 4) Retribusi jasa usaha terminal
- 5) Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir
- 6) Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- 7) Retribusi jasa usaha rumah potong hewan
- 8) Retribusi penyebrangan di air
- 9) Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- 10) Retribusi jasa usaha pelayanan kepelabuhan
- 11) Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga

12) Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair

13) Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan untuk melindungi kepentingan umum. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- 3) Retribusi izin gangguan
- 4) Retribusi izin usaha perikanan

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain pemerintah daerah. transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini sebagai berikut:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah
- f. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan denda retribusi
- j. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k. Pendapatan dari pengembalian
- l. Fasilitas sosial dan umum
- m. Pendapatan dari penyelenggara pendidikan dan pelatihan
- n. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
- o. Hasil pengelolaan dana bergulir

Dalam rangka lebih mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang merata di seluruh daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah, maka di dalam bidang keuangan ada tiga fokus alokasi anggaran pusat ke daerah yakni (lihat RAPB 2019 Kemenkeu, 2019),

1. Meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah;
2. Meningkatkan kualitas dan mengurangi ketimpangan layanan publik antardaerah;

3. Mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan di daerah.

2.1.5 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.5.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Proses peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu dilihat sejauh mana pertumbuhan ekonomi yang ada pada suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi dilihat dari pendapatan perkapita di Negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dalam keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah dan mempunyai peranan penting terhadap keberhasilan suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan implikasi aktivitas perekonomian terhadap bertambahnya pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Rendahnya pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan oleh jumlah penduduk yang meningkat sebagai salah satu contohnya adalah Indonesia. Secara logika pertumbuhan penduduk yang meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga namun pada kenyataannya malah jumlah penduduk yang banyak tidak dapat menyeimbangi dengan lapangan pekerjaan yang ada sehingga penduduk tidak mendapatkan kesempatan pekerjaan, sehingga pertumbuhan ekonomi pun menjadi rendah. Tingginya pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan perkapita, jika penduduk banyak yang tidak bekerja atau mendapatkan kesempatan kerja maka tidak akan memperoleh pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu Negara untuk menyediakan semakin banyak barang kepada penduduknya, kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Pertumbuhan ekonomi

merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijaksanaan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi (Todaro dalam Nurhayati, 2015).

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk, sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan.

Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya pertambahan atau perubahan pendapatan nasional (produksi nasional) dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya. Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian makro adalah penambahan nilai Produk Domestik Bruto riil (PDB) atau peningkatan pendapatan nasional. Menurut Mankiw dalam Suci dan Asmara (2014), PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian yang tujuannya adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu.

2.1.5.2 Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan baru merumuskan analisis pertumbuhan bersifat endogen. Perbaikan sistem ekonomi menciptakan pertumbuhan. Kekuatan modal dan keputusan ekonomi yang tepat untuk berinvestasi mempunyai peran penting dalam mendorong ekonomi. Kekuatan besar untuk mendorong pertumbuhan

ekonomi adalah akumulasi modal (Mankiw, 2006). Salah satu pembentuk akumulasi modal adalah human capital yang tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis *value for money*. Model MRW sebagai teori pertumbuhan baru atau dikenal *new growth theory* ternyata lebih baik dibandingkan dengan pandangan neo klasik. Aliran neo klasik yang mengemukakan bahwa keadaan akan menjadi stabil sendiri oleh kekuatan pasar. Sedangkan teori *neo keynes* menyatakan pasar tidak senantiasa dapat membentuk kestabilan (Pujiati, 2011).

Pemikiran *instability theorem* mengemukakan perkembangan ekonomi yang stabil seperti yang diharapkan oleh para investor dalam bentuk *warranted rate of growth* semestinya memiliki kemiripan dengan perkembangan yang ditentukan oleh pasar atau *natural rate of growth*. Indikator penentuan *warranted rate of growth* serta *natural rate of growth* memiliki perbedaan. Dengan demikian, kondisi *warranted rate of growth* dan *natural rate of growth* memiliki ketidaksamaan. Persyaratan untuk perkembangan yang stabil menjadi tidak dapat terpenuhi. Perkembangan dapat stabil dan terus berlanjut dengan dukungan intervensi pemerintah. Pemikiran teori *neo keynes* berbeda dengan teori neo klasik yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah tidak diperlukan. Pandangan ini berpendapat mekanisme pasar akan dapat berjalan dengan baik. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pengembangan wilayah berpedoman pada teori *neo keynes*. Campur tangan pemerintah dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti upaya penurunan nilai *Capital Output Ratio* (COR). Langkah ini dilakukan untuk tiap satuan kapital yang dikeluarkan investor agar dapat menghasilkan

keluaran yang lebih banyak. Penurunan COR dapat dilakukan dengan penyesuaian fiskal seperti penurunan suku bunga pinjaman, keringanan pajak dan sebagainya. Campur tangan dapat juga berbentuk investasi untuk prasarana seperti jalan raya, irigasi, listrik, air bersih dan lain-lain (Sumardjoko, 2019).

Pada daerah terbelakang, pembangunan prasarana hampir seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Bentuk lain campur tangan pemerintah adalah memberikan kemudahan berinvestasi bagi swasta maupun berbagai subsidi. Namun, besarnya peran pemerintah berpeluang untuk menghasilkan *government failure* antara lain akibat inefisiensi birokrasi yang menghasilkan penyalahgunaan anggaran publik. Upaya memperkecil angka COR dapat dilakukan dengan menghilangkan kebocoran tersebut. Perkembangan ekonomi wilayah kepulauan dapat dilakukan dengan perspektif kombinasi teori-teori tersebut. Dalam kaitan ini, sebagian teori mungkin berguna untuk menjelaskan fenomena tertentu, namun tidak mampu untuk menjelaskan fenomena lain. Dalam konteks sekarang, teori-teori tersebut dianggap kemungkinan mampu menjawab kebutuhan untuk menyelenggarakan pembangunan secara berkelanjutan (Wibisono, 2005).

Teori pertumbuhan menurut Anwar (2018) terbagi atas dua yaitu sebagai berikut :

1. Teori Pertumbuhan Endogen

Model Pertumbuhan Endogen Konsep pertumbuhan yang lainnya yaitu konsep pertumbuhan endogen. Konsep ini sering pula disebut dengan teori pertumbuhan baru (*new growth theory*). Model pertumbuhan endogen mempunyai kemiripan struktural dengan teori pertumbuhan neoklasik, namun berbeda dalam

hal asumsi yang mendasarinya dan kesimpulan yang ditarik darinya. Teori ini berupaya untuk menjelaskan keberadaan skala hasil yang semakin meningkat dan pola pertumbuhan jangka panjang yang berbeda-beda antar negara. Teori pertumbuhan endogen (*theory of endogenous growth*) dirintis oleh Romer (1986) dan Lucas (1989). Salvatore (1997) mengatakan bahwa teori ini mampu menyajikan suatu ulasan analitis yang lebih menyeluruh dan meyakinkan mengenai hubungan antara perdagangan internasional dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Secara spesifik, teori baru pertumbuhan ekonomi endogen ini menyatakan bahwa pendapatan penurunan hambatan-hambatan perdagangan dalam berbagai bentuk, baik tarif maupun non-tarif, akan mempercepat tingkat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di suatu negara dalam jangka panjang.

Teori pertumbuhan endogen yang dipelopori oleh Romer (2001) dan Lucas (1988) merupakan awal kebangkitan dari pemahaman baru mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini menyatakan bahwa perkembangan dunia yang ditandai oleh perkembangan teknologi modern yang digunakan dalam proses produksi. Permasalahan dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisa dijelaskan secara baik oleh teori Neoklasik, seperti penjelasan mengenai *decreasing return to capital*, persaingan sempurna dan eksogenitas teknologi dalam model pertumbuhan ekonomi. Teori Pertumbuhan endogen merupakan suatu teori pertumbuhan yang membahas mengenai pertumbuhan dalam jangka panjang ditentukan dari model oleh beberapa variabel pertumbuhan yang dianggap eksogen (Romer, 1994:3; Barro

dan Martin, 1999:38).

Menurut Romer (1994), teori pertumbuhan endogen mempunyai tiga elemen dasar yaitu :

- a. Adanya perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan.
- b. Adanya penciptaan ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari mekanisme luberan pengetahuan (*knowledge spillover*).
- c. Produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas.

Fungsi produksi pada model pertumbuhan endogen ditunjukkan oleh formulasebagai berikut :

$$Y = F(R, K, H)$$

Dimana :

Y= Total *Output*

R= Penelitian dan Pengembangan (R&D)

K= Modal Fisik

H= Akumulasi Modal Insani

Perubahan sederhana dalam fungsi produksi bisa membedakan tentang pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Dalam model Solow, tabungan akan mendorong pertumbuhan sementara waktu, namun adanya *diminishing marginal return capital investment* secara berangsur-angsur akan mendorong perekonomian mencapai kondisi mapan (*steady state*) dimana pertumbuhan hanya bergantung pada kemajuan teknologi eksogen. Sebaliknya dalam model pertumbuhan

endogen, tabungan dan investasi mampu mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan. (Lincoln Arsyad, 2010;94).

2. Pertumbuhan Ekonomi Eksogen

Pertumbuhan ekonomi ini bergantung kepada fungsi produksi Karena tingkat kemajuan teknologi ditentukan secara eksogen maka model NeoKlasik Solow juga disebut model pertumbuhan eksogen. Teori pertumbuhan NeoKlasik dikembangkan oleh dua orang ekonom yaitu : Robert Solow dan Trevor Swan. Teori Neo Klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan dan perkembangan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran agregat "Teori pertumbuhan ini juga menekankan bahwa perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi".

2.1.5.3 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno dalam Hanif 2018 menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan faktor non ekonomi antara lain sebagai berikut :

a. Tanah dan kekayaan alam lainnya

Sumber daya alam merupakan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di negara berkembang, sumber daya alam yang tersedia seringkali terbengkalai karena kurang atau salah pemanfaatan. Jika sumber daya alam tidak dipergunakan secara tepat, maka suatu negara tidak mungkin mengalami apa yang disebut dengan kemajuan.

b. Akumulasi modal

Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat diproduksi. Apabila stok modal naik dalam batas waktu tertentu maka disebut akumulasi modal atau pembentukan modal. Proses pembentukan modal akan menaikkan output nasional. Investasi di bidang barang modal tidak hanya menaikkan produksi, tetapi juga dapat menaikkan kesempatan kerja.

c. Organisasi

Organisasi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan ekonomi yang bersifat komplemen bagi modal dan menaikkan produktivitas. Dalam pertumbuhan ekonomi modern, peranan swasta sangat penting. Sedangkan di negara berkembang, peranan pemerintah sangat besar dalam penyediaan sarana sosial.

d. Teknologi

Proses pertumbuhan ekonomi sangat penting didukung oleh kemajuan teknologi. Proses yang dimaksud berkaitan dengan perubahan yang mencakup metode produksi yang merupakan hasil pembaharuan atau penelitian baru. Pertumbuhan teknologi dapat meningkatkan produktivitas kerja, modal dan faktor produksi lain yang pada akhirnya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

e. Pembagian kerja dan skala produksi

Spesialisasi dan pembagian kerja akan meningkatkan produktivitas. Kedua hal tersebut akan menggiring perekonomian ke arah ekonomi produksi dengan skala besar yang selanjutnya dapat membantu perkembangan industri. Luas pasar akan meningkat akibat dari perekonomian yang meningkat. Hal tersebut

dipengaruhi oleh besar kecilnya tingkat permintaan, banyak tidaknya tingkat produksi, tersedianya sarana transportasi dan sebagainya. Jika skala produksi besar maka pembagian kerja dan spesialisasi juga akan semakin luas. Dengan demikian output akan dapat ditingkatkan, dengan sendirinya pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

2.1.5.4 Perhitungan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui perbandingan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan metode produksi atas dasar harga konstan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \frac{PDRBit - PDRBit - 1}{PDRBit - 1} \times 100\%$$

Keterangan :

Y : Pertumbuhan Ekonomi

PDRBit : Produk Domestik Regional Bruto tahun i

PDRBit - 1 : Produk Domestik Regional Bruto tahun i - 1

2.1.6 Kemampuan Keuangan Daerah

Kriteria penting yang lain untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor yang penting dalam mengatur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

termasuk didalamnya segala kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan tersebut, keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan dikeluarkannya undang-undang tentang Otonomi Daerah, membawa konsekuensi bagi daerah yang akan menimbulkan perbedaan antar daerah yang satu dengan yang lainnya, terutama dalam hal kemampuan keuangan daerah, antara lain (Mahmudi, 2010):

1. Daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah.
2. Daerah yang mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Daerah yang sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah, dan
4. Daerah yang kurang mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.

Selain itu ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Mahmudi, 2010):

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya.
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Analisis kinerja keuangan diukur melalui penghitungan rasio-rasio keuangan yang merupakan alat ukur kemampuan keuangan daerah. Rumus yang digunakan dalam mengukur kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Kota atau Provinsi menurut Halim (2001:127) adalah:

2.1.6.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Variabel kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara ketergantungan pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar dan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibanding pendapatan yang berasal dari sumber lainnya seperti bantuan pemerintah pusat maupun pinjaman daerah. Formula yang digunakan untuk mengukur adalah sebagai berikut :

$$\text{Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Dana Perimbangan}}$$

2.1.6.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Variabel kemampuan keuangan daerah mencerminkan perbandingan jumlah pendapatan transfer ke daerah yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan/atau pemerintah provinsi (Mahmudi, 2010). Ketergantungan keuangan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktifitas pembangunan

daerah melalui optimalisasi PAD, yang diukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tanpa subsidi. Pengukuran variabel ketergantungan keuangan daerah menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{Ketergantungan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan APBD Tanpa Subsidi}}$$

2.1.6.3 Efektivitas Pendapatan

Variabel efektifitas pendapatan daerah menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran. Keberhasilan suatu pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan, salah satunya bisa diukur dengan efektifitas pelaksanaan anggaran tersebut. Hal tersebut bisa diketahui dengan mengukur rasio efektifitas. Pengukuran tingkat efektifitas ini untuk mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran yang memerlukan data-data realisasi pendapatan dan target pendapatan. Rasio efektifitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan dengan target pendapatan. Pengukuran variabel Efektifitas Pendapatan Daerah menggunakan kesetaraan persamaan yang dihitung sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas pendapatan daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}$$

2.1.6.4 Derajat Desentralisasi Fiskal

Variabel derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antar

jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan (Bisma dan Susanto, 2010). PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengukuran variabel derajat desentralisasi fiskal menggunakan kesetaraan persamaan yang dihitung sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$$

2.2. Tinjauan Empiris

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut antara lain :

1. Ali Tutupoho (2019) dengan judul penelitian Analisis Sektor Basis dan Sektor Non Basis terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota). Faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan laju pertumbuhan antar kabupaten/kota yaitu karena secara individu setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Artinya kabupaten yang

memiliki sumber daya yang melimpah tentu akan mampu memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sementara kabupaten/kota yang memiliki sumber daya yang terbatas atau sedikit, maka akan memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang rendah pula.

2. Andy Pratama dan Ady Soejoto (2013) dengan judul penelitian Pengaruh Sektor Basis dan Non Basis terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sangat diperlukan untuk mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB adalah jumlah seluruh nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai sector lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya di suatu wilayah tanpa memperhatikan kepemilikan atas faktor produksi. PDRB dapat dikategorikan dalam berberbagai sektor ekonomi yaitu: Pertanian; Pertambangan dan penggalan; Industri pengolahan, listrik, gas dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel dan restoran; angkutan dan komunikasi; persewaan dan jasa perusahaan; jasa lainnya. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa Variabel sektor basis memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan dan Variabel sektor non basis memiliki pengaruh signifikan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Secara bersama-sama sektor basis dan sektor non basis berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Hal ini berarti jika sektor basis

dan sektor non basis ditingkatkan maka akan dipengaruhi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan.

3. Mafizatun Nurhayati (2015) dengan judul penelitian Pengaruh Kemandirian Daerah, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di 33 Provinsi Tahun 2008 – 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemandirian fiskal daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi pemerintah daerah juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pendapatan perkapita daerah dan jumlah angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan perkapita merupakan salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi. Namun pendapatan per kapita yang semakin tinggi tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah semakin meningkat. Pembangunan manusia yang berkualitas akan mendukung pembangunan ekonomi dan berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Namun, sebaliknya apabila sumber daya manusia dapat juga menjadi beban dalam kegiatan ekonomi.
4. Cahaya Stannia Suci dan Alla Asmara (2014) dengan judul penelitian Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan penerimaan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan pajak karena pajak daerah sebagai penerimaan yang paling

dominan untuk penerimaan PAD dan melakukan kebijakan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian khususnya pada bidang jasa, hotel dan restoran serta industri pengolahan dan juga pertanian karena sektor-sektor tersebut memiliki nilai yang paling tinggi terhadap peningkatan PDRB di Provinsi Banten Provinsi Banten. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat didukung dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah khususnya pada daerah memiliki rata-rata perubahan PDRB terbesar di Provinsi Banten yaitu Kota Tangerang dan Kabupaten. Pengurangan ketergantungan Dana Perimbangan harus dilakukan dengan kebijakan yang tepat agar tidak mengganggu kinerja pemerintah dan ekonomi dalam jangka panjang serta penggunaannya sesuai dengan tujuan awal yaitu mengurangi kesenjangan keuangan antar daerah dan bersifat sebagai pendukung untuk tujuan pembangunan.

5. Choroel Woestho, Ari Sulityowati dan Rycha Kuwara Sari (2020) dengan judul penelitian Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto. Kemampuan keuangan daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Jeneponto, dimana nilai probabilitas kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar $0,02 < 0,05$. Kemandirian keuangan daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Jeneponto, dimana nilai signifikansi kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar $0,01 < 0,05$.

6. Ana Prihatiningsih (2010) dengan judul penelitian Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta. Hasil penelitiannya menemukan bahwa Rasio kemandirian daerah yang menggambarkan sampai seberapa besar tingkat ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, diperoleh dengan membandingkan penerimaan PAD terhadap penerimaan Bantuan dan Sumbangan Daerah. Dari tahun 2003-2008, rerata perhitungan rasio kemandirian Kota Surakarta menghasilkan nilai 20,52%. Karena nilainya yang berada diantara 0%-25%, maka Kota Surakarta dianggap memiliki kemampuan keuangan yang rendah sekali dan mempunyai pola hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat, yang mana ketergantungan finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi dibandingkan kemandirian daerahnya.
7. Nurjanna Ladjin (2008) dengan judul penelitian Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah). Hasil penelitian menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah Propinsi Sulawesi Tengah di era otonomi daerah masih rendah, atau dapat dinyatakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi. Hal ini ditandai dari proporsi DAU dan DAK terhadap TPD yang relatif semakin besar. Sebaliknya, kontribusi PAD dan BHPBP terhadap TPD yang masih sangat rendah.
8. Anggatia Ariza (2016) dengan judul penelitian Pengaruh Kemampuan Keuangan dan Posisi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota

Di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil penelitian menemukan bahwa Kemampuan keuangan kabupaten/kota di Kalimantan Barat tahun 2006-2010 dilihat dari indikator desentralisasi fiskal masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari rata-rata proporsi PAD dan BHPBP kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang masih jauh di bawah rata-rata kabupaten/kota se-Indonesia. Proporsi sumbangan daerah yang besar baik berupa DAU dan DAK menunjukkan peran pemerintah pusat masih sangat besar. Proporsi sumbangan daerah kabupaten/kota di Kalimantan Barat lebih tinggi daripada rata-rata kabupaten/kota se-Indonesia. Pemerintah daerah sebaiknya dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang berasal dari PAD sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat namun dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan tujuan otonomi daerah. Posisi fiskal yang dilihat dari empat indikator yaitu kebutuhan fiskal, kapasitas fiskal, elastisitas dan upaya fiskal menunjukkan bahwa Kota Singkawang memiliki posisi yang tinggi, Kabupaten Landak dan Kabupaten Pontianak memiliki posisi yang rendah sedangkan kabupaten/kota lainnya memiliki posisi yang berbeda. Hasil ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan sesuai dengan posisi fiskalnya agar lebih efektif dan efisien. Hasil pengujian model menemukan bahwa rasio PDS berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dimana jika rasio PDS meningkat maka akan mengurangi pertumbuhan ekonomi sedangkan belanja langsung per kapita berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam usaha mengoptimalkan PDS

sebaiknya diiringi dengan pengelolaan yang baik sehingga di respon positif oleh masyarakat serta peningkatan porsi belanja langsung untuk kegiatan produktif agar menimbulkan efek multifier terhadap pertumbuhan ekonomi.

9. Afina Dwi Sartika (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2014-2016). Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Modal utama pemerintah daerah dalam membiayai dan menunjang aktivitas ekonomi yang dilakukan berasal dari Penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aktivitas ekonomi yang meningkat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga baik. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan secara statistik signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut. Kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini mampu menjelaskan bahwa pemerintah daerah belum maksimal dalam memanfaatkan kekuatan lokal yang dimilikinya secara optimal. Suatu daerah harusnya mampu mengimbangi kekuatan dari luar dengan memaksimalkan potensi lokal, salah satunya dengan mempermudah proses investasi.

Tabel 2.1 Matriks Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Ali Tutupoho (2019)	Analisis Sektor Basis dan Sektor Non Basis terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Maluku (Studi Kasus Kabupaten Kota)			Faktor yang menyebabkan terjadi perbedaan laju pertumbuhan antar kabupaten/kota yaitu karena secara individu setiap daerah memiliki potensi sumber daya yang berbeda-beda. Artinya kabupaten yang memiliki sumber daya yang melimpah tentu akan mampu memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi sementara kabupaten/kota yang memiliki sumber daya yang terbatas atau sedikit, maka akan memperoleh laju pertumbuhan ekonomi yang rendah pula.
2	Andy Pratama dan Ady Soejoto (2013)	Pengaruh Sektor Basis dan Non Basis terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pasuruan			Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa Variabel sektor basis memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan dan Variabel sektor non basis memiliki pengaruh signifikan positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Secara bersama-sama sektor basis dan sektor non basis berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan. Hal ini berarti jika sektor basis dan sektor non basis ditingkatkan maka akan dipengaruhi dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pasuruan.
3	Mafizatun Nurhayati (2015)	Pengaruh Kemandirian Daerah, Investasi Pemerintah, Angkatan Kerja dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pertumbuhan Ekonomi			Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemandirian fiskal daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Investasi pemerintah daerah juga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan pendapatan perkapita daerah dan jumlah angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Pendapatan perkapita merupakan

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
		Daerah Di 33 Provinsi Tahun 2008 – 2013			salah satu ukuran bagi kemakmuran suatu daerah, pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan insentif bagi diubahnya struktur produksi.
4	Cahaya Stannia Suci dan Alla Asmara (2014)	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten			Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peningkatan penerimaan PAD dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan pajak karena pajak daerah sebagai penerimaan yang paling dominan untuk penerimaan PAD dan melakukan kebijakan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas perekonomian khususnya pada bidang jasa, hotel dan restoran serta industri pengolahan dan juga pertanian karena sektor-sektor tersebut memiliki nilai yang paling tinggi terhadap peningkatan PDRB di Provinsi Banten Provinsi Banten.
5	Choiroel Woestho, Ari Sulityowati dan Rycha Kuwara Sari (2020)	Analisis Kemampuan dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Jeneponto			Kemampuan keuangan daerah (X1) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Jeneponto, dimana nilai probabilitas kemampuan keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar $0,02 < 0,05$. Kemandirian keuangan daerah (X2) berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) pada Kabupaten Jeneponto, dimana nilai signifikansi kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar $0,01 < 0,05$.
6	Ana Prihatiningsih (2010)	Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Surakarta.			Hasil penelitiannya menemukan bahwa Rasio kemandirian daerah yang menggambarkan sampai seberapa besar tingkat ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, diperoleh dengan membandingkan penerimaan PAD terhadap penerimaan Bantuan dan Sumbangan Daerah. Dari tahun 2003-2008, rerata perhitungan rasio kemandirian Kota Surakarta

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
					menghasilkan nilai 20,52%. Karena nilainya yang berada diantara 0%-25%, maka Kota Surakarta dianggap memiliki kemampuan keuangan yang rendah sekali dan mempunyai pola hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat, yang mana ketergantungan finansial terhadap pemerintah pusat masih sangat tinggi dibandingkan kemandirian daerahnya.
7	Nurjanna Ladjin (2008)	Analisis Kemandirian Fiskal Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Di Propinsi Sulawesi Tengah).			Hasil penelitian menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah Propinsi Sulawesi Tengah di era otonomi daerah masih rendah, atau dapat dinyatakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat masih cukup tinggi. Hal ini ditandai dari proporsi DAU dan DAK terhadap TPD yang relatif semakin besar. Sebaliknya, kontribusi PAD dan BHPBP terhadap TPD yang masih sangat rendah.
8	Anggatia Ariza (2016)	Pengaruh Kemampuan Keuangan dan Posisi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat.			Hasil penelitian menemukan bahwa Kemampuan keuangan kabupaten/kota di Kalimantan Barat tahun 2006-2010 dilihat dari indikator desentralisasi fiskal masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari rata-rata proporsi PAD dan BHPBP kabupaten/kota di Kalimantan Barat yang masih jauh di bawah rata-rata kabupaten/kota se-Indonesia.
9	Afina Dwi Sartika (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel			Hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Modal utama pemerintah daerah dalam membiayai dan menunjang aktivitas ekonomi yang dilakukan berasal dari Penerimaan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
		Intervening (Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode tahun 2014-2016)			

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Perencanaan pengembangan daerah pada dasarnya merupakan langkah konkret menerapkan konsep-konsep pembangunan ekonomi pada dimensi keruangan. Definisi perencanaan pengembangan daerah adalah implementasi langkah-langkah pembangunan ekonomi pada daerah tertentu. Dengan demikian definisi ini merupakan akumulasi yang berkelanjutan dari konsep pembangunan ekonomi dengan memperhatikan permintaan dan penawaran. *Opportunity side* berbentuk kemampuan atau potensi wilayah tersebut untuk dikembangkan. Sedangkan *demand side* merupakan *market opportunity* untuk membangun daerah tersebut (Harun, 2017). Olehnya itu kinerja keuangan daerah menentukan perkembangan aktivitas perekonomian daerah.

Kinerja keuangan dalam penelitian ini berupa kemandirian, kemampuan keuangan, efektifitas dan derajat desentralisasi fiskal. Keempat variabel tersebut digunakan untuk menguji secara langsung pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian diatas, kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut :

3.1.1 Hubungan Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Kemandirian daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak dan retribusi daerah dan lain-lain dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat

independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah yang dijalankan, tanpa tergantung Bantuan dari luar, termasuk dari pemerintah pusat (Nurhayati, 2015).

Semakin tinggi pendapatan asli daerah mengindikasikan tingkat ketergantungan fiskal daerah tersebut kepada pusat semakin berkurang. Selanjutnya daerah lebih leluasa dan fleksibel dalam merencanakan alokasi anggaran sesuai dengan agenda ekonominya. Melalui belanja rutin, belanja pembangunan dan infrastruktur, ataupun belanja lainnya, pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan daerah diharapkan mampu menciptakan sejumlah aktivitas ekonomi baru dalam masyarakat. Dengan meningkatnya aktivitas ekonomi pada masyarakat, akan terjadi peningkatan jumlah output barang dan jasa yang diikuti pula dengan meningkatnya jumlah uang beredar dari segi pembelanjaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kondisi tersebut akan meningkatkan nilai PDRB dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Brata (2004) membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena daerah lebih leluasa dalam memanfaatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan agenda pembangunan ekonominya. Akan tetapi hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat mengarah ke hubungan negatif jika daerah terlalu ofensif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya. **Hipotesis pertama (H1) penelitian ini adalah rasio kemandirian daerah sebagai refleksi**

penguatan pendapatan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara.

3.1.2 Hubungan Kemampuan Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Marpaung (2017) berpendapat desentralisasi fiskal menciptakan efisiensi ekonomi dan secara dinamis akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Argumentasinya adalah pengeluaran untuk infrastruktur dan sektor sosial akan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penyebabnya daerah mengetahui karakteristik wilayah. Rangkaian penelitian yang dilakukan Bahl dan Linh dan Zang dan Zou (1997) menemukan desentralisasi penerimaan dan pengeluaran merupakan jalan untuk meningkatkan efisiensi di sektor publik, mengurangi defisit anggaran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendapat ini didasari bahwa pemerintah daerah akan lebih tepat dalam memenuhi kebutuhan daerah daripada pemerintah pusat.

Lindaman dan Kurt (2002) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang terwujud dalam pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan argumentasi di mana desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. Sebagian ekonom mempunyai kepercayaan desentralisasi fiskal akan mendorong pertumbuhan, memperbaiki pemerataan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. **Hipotesis kedua (H2) penelitian ini adalah kemampuan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara.**

3.1.3 Hubungan Efektivitas Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara langsung. Terdapat beberapa mekanisme dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal akan meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor pengeluaran pemerintah, jadi efek dinamis ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ada hubungan positif antara desentralisasi fiskal dengan pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal akan menyebabkan instabilitas makroekonomi, sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Penelitian Wibowo (2008) dengan menggunakan pendekatan estimasi panel *fixed effect*, menegaskan bahwa desentralisasi fiskal di Indonesia secara umum memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan daerah selama periode tahun 1999-2004. Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa era baru desentralisasi fiskal yang diluncurkan sejak tahun 2001 ternyata memberikan dampak yang relatif lebih baik terhadap pembangunan daerah dibandingkan dengan rezim desentralisasi fiskal sebelumnya. **Hipotesis ketiga (H3) yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah rasio efektifitas pendapatan daerah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara.**

3.1.4 Hubungan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah menduduki posisi penting dalam upaya pengembangan kapabilitas, efisiensi, dan efektifitas pemerintah daerah, dan dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan, alat

bantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan. Anggaran daerah juga sebagai alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktifitas di berbagai unit kerja. Selain itu, anggaran tersebut dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan dan menduduki posisi sentral yang harus memuat kinerja keuangan, baik untuk penilaian secara internal maupun keterkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Lindaman & Kart (2002) menjelaskan variabel desentralisasi penerimaan dan pengeluaran untuk melihat variabel desentralisasi dan human development index untuk melihat basic needs. Hasil kajian empirik menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan argumentasi bahwa desentralisasi fiskal akan membuat pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakatnya. **Hipotesis keempat (H4) yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah derajat desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Toraja Utara.**

3.1.4 Hubungan Kemandirian, Kemampuan Keuangan, Efektivitas dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

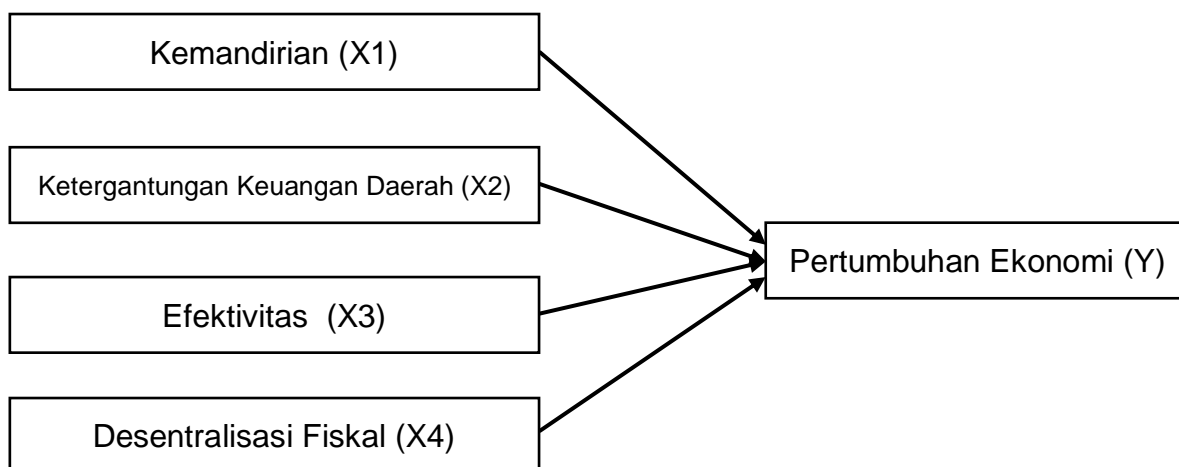
Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya penambahan atau perubahan pendapatan nasional (produksi nasional) dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya. Pertumbuhan ekonomi dalam pengertian makro adalah penambahan nilai Produk Domestik Bruto riil (PDB) atau peningkatan pendapatan nasional. Menurut Mankiw (2007), PDB

sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian yang tujuannya adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu.

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai dari penggunaan banyak tenaga tenaga kerja, tidak menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita, namun jika pertumbuhan ekonomi dicapai dari daerah pusat. penggunaan sumberdaya yang lebih produktif, hal tersebut dapat menghasilkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dan meningkatkan standar hidup rata-rata masyarakat. Badan Pusat Statistik menggunakan pendekatan PDB dan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk menggambarkan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dicerminkan untuk mencerminkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik (2013), PDRB menyatakan pendapatan total dan pengeluaran total daerah atas output barang dan jasa suatu daerah. PDRB dapat dihitung dengan dua cara, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggunakan harga pada tahun berjalan, pada saat menilai produksi, biaya antara dan komponen nilai tambah sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggunakan harga barang dan jasa pada tahun dasar, saat ini yang digunakan adalah harga konstan 2000.

Dari uraian kerangka konseptual, telah dijelaskan hubungan terkait antara variable dari kemampuan keuangan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, berikut akan diperlihatkan kerangka pikir dari penelitian ini yaitu:



Gambar 3.1. Kerangka Konseptual Penelitian

3.2. Hipotesis

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dirumuskan hipotesis yaitu bahwa diduga :

1. Kemandirian berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara.
2. Ketergantungan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara.
3. Kemandirian efektivitas berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara.
4. Derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara.
5. Kemandirian, kemampuan keuangan, efektivitas dan derajat desentralisasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toraja Utara.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini berusaha untuk menghitung, menggambarkan dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian daerah, rasio kemampuan keuangan daerah, rasio efektivitas, dan derajat desentralisasi fiskal.

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini dilaksanakan selama lima bulan terhitung bulan Maret sampai Juli 2021.

4.3 Jenis dan Sumber Data

4.3.1 Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif adalah data yang diperoleh berupa simbol angka atau lambang bilangan.
2. Data Kualitatif adalah data atau informasi yang diperoleh berbentuk kalimat verbal bukan berupa symbol atau bilangan.